



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IRVAN WAHYUDRAJAD**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **239944**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m2/109 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/120 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 51 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/19 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 809.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XMAX MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. MOTOR, HONDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.



160.000.000

5. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

270.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 269.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 185.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.013.000.000

III. HUTANG Rp. 233.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.779.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.